**Sastra sebagai *Advocatus Diaboli***

*Berno Jani*

*Mahasiswa di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero*

*enojehani@gmail.com*

*No WA: 0895333455553*

**Pendahuluan**

Perkembangan sastra Indonesia telah mencapai suatu tingkat yang signifikan. Artinya, tidak hanya dari segi kuantitas karya yang tersebar luas di berbagai media cetak dan elektronik, tetapi juga dari kualitas dan kedalaman maknanya. Perlu diingat bahwa sastra tidak semata-mata berfungsi sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai medium reflektif dan kritis terhadap realitas sosial, politik, serta budaya yang melingkupi masyarakat pada umumnya.

Secara historis, sastra Indonesia telah mengalami transformasi dari sastra lama yang berakar pada tradisi Melayu, Sansekerta, dan Jawa Kuno menuju sastra modern yang berorientasi pada semangat nasionalisme dan pembaruan bahasa. Transformasi ini memungkinkan karya sastra menjadi wahana partisipatif dalam membahasakan dinamika dan penderitaan masyarakat secara kontekstual.

Namun di tengah kemajuan teknologi terdapat tantangan internal, terutama berkaitan dengan instrumentalitas sastra sebagai komoditas ekonomi yang berpotensi menggeser fungsi moralnya. Fenomena ini menuntut para sastrawan untuk merekonstruksi motivasi dan idealisme mereka agar sastra tetap berperan sebagai agen perubahan yang kritis dan konstruktif atau dengan kata lain sebagai “*advocatus daiboli”.*

**Sastra sebagai Nafas Kritik**

Sastra secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *sas* yang berarti mengajar atau memberi petunjuk, dan *tra* yang berarti alat atau sarana. Dengan demikian, sastra dipahami sebagai alat untuk mengajar dan memberikan kompas kehidupan. Dalam perkembangannya, sastra tidak hanya berupa karya tulis yang memiliki keindahan bahasa, tetapi juga merupakan karya seni yang bersifat fiktif dan imajinatif, yang mengandung unsur realitas tertentu. Sastra menjadi medium pengungkapan pikiran, perasaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa berbeda maknanya tergantung pada pembacanya.

Fungsi sastra sangat beragam, antara lain sebagai pembentuk wawasan baru, pembentuk kepribadian bangsa, serta sarana penyampaian nasihat dan kritik sosial. Sastra juga berperan sebagai catatan warisan budaya, pengalaman perwakilan tentang tempat dan situasi yang belum pernah dialami pembaca, serta manifestasi ekspresi tekanan batin dan keindahan bahasa. Dengan demikian, sastra tidak hanya sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai media refleksi, pendidikan, dan pengembangan budaya serta moral masyarakat.

Perlu dicatat bahwa sastra bukan sekadar seni berbahasa, melainkan instrumen sosial-politik yang memiliki daya liberatif. Artinya, sastra berperan sebagai pengganggu *status quo* yang menyuarakan kebenaran, membela yang tertindas, dan mengkritisi kekuasaan yang ada. Sebagai bentuk perlawanan kultural, sastra memiliki fungsi advokatif: menyuarakan hak rakyat, menyingkap ketidakadilan, dan membuka ruang ekspresi bagi mereka yang dibungkam. Saat suara rakyat dikerdilkan oleh kekuasaan, sastra wajib bicara lantang.

Selain itu, sastra juga hadir sebagai entitas alternatif, ketika wakil politik gagal mewakili rakyat. Melalui pendekatan kontekstual, sastra menangkap denyut keprihatinan sosial: kemiskinan, korupsi, ketimpangan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Ia menjadi napas gelisah masyarakat yang dituangkan dalam karya. Dengan demikian, sastra adalah wadah kritik sekaligus ruang diskursus publik. Ia bisa menjadi sahabat sekaligus penantang penguasa. Karena pada akhirnya, kata-kata memiliki kekuatan untuk mengguncang tatanan dan memicu transformasi.

Dalam karya sastra terkandung berbagai nilai penting, yaitu nilai artistik sebagai manifestasi keterampilan seni, nilai kultural yang merefleksikan budaya dan masyarakat, serta nilai etis, moral, dan agama yang menyampaikan petuah dan ajaran. Selain itu, nilai praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga melekat pada karya sastra yang baik, asalkan tidak mengorbankan keindahan, kejujuran, dan kebenaran demi alasan komersial.

**Apa itu *Advocatus Diaboli*?**

*Advocatus diaboli* secara harfiah berarti “pembela iblis”, seringkali terdengar menyeramkan dan negatif. Namun, secara fungsional istilah ini justru mengacu pada peran penting dalam tradisi hukum Gereja Katolik Roma, terutama dalam proses kanonisasi santo/santa atau orang kudus. *Advocatus diaboli* berfungsi sebagai penyeimbang dengan mengambil posisi kontra untuk menguji secara kritis dan skeptis layak atau tidaknya seseorang mendapat gelar kesucian. Peran ini memastikan objektivitas dengan menguji validitas klaim dari persepktif yang berbeda.

Lebih dari sekadar peran di ranah agama, konsep ini melahirkan metode debat dan diskusi kritis yang mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran tidak pernah muncul dari satu suara saja, melainkan dari pergulatan antara keyakinan dan keraguan yang sehat. Ia adalah simbol bahwa agar sebuah putusan bisa adil dan bermakna, harus ada yang berani berdiri sebagai “pengacara kebenaran yang skeptis.”

Dalam ranah hukum modern, *advocatus diaboli* berperan seperti pembela terdakwa yang menjaga agar proses peradilan berlangsung adil dan manusiawi. Ia bukan hanya membela terdakwa, tetapi membela hak atas keadilan yang benar-benar jujur dan transparan. Lawan sekaligus pelengkapnya, jaksa dan pembela bersama-sama menghidupkan semangat “*fair trial*,” di mana keadilan bukan kemenangan sepihak, tapi keseimbangan yang menghormati kemanusiaan. Kini, *advocatus diaboli* ada dalam diskusi sehari-hari untuk membantu menguji dan memperbaiki argumen. Meski sering dianggap mengganggu, peran ini penting untuk menemukan kelemahan dan memperkuat posisi kita dalam mengambil kebijakan. Tanpa keberanian menjadi “*advocatus diaboli*” dalam diskusi, objektivitas dan kreativitas berpikir sulit diperoleh.

Pada akhirnya, peran *advocatus diaboli* mengingatkan kita bahwa keadilan adalah sebuah seni halus yang membutuhkan keberanian untuk mengungkap sisi gelap dan kelemahan, demi melahirkan kebenaran yang murni.

**Sastra: Menggugat Kekuasaan yang Menindas**

Dalam konteks sastra, *advocatus diaboli* bukanlah "pengacara iblis" dalam arti harfiah, melainkan metafora bagi peran kritis yang dijalankan oleh sastra: menggugat, mengganggu, dan menantang narasi dominan yang menindas atau menyesatkan. Sastra menyajikan keindahan bahasa dan menjadi ruang perlawanan simbolik terhadap ketimpangan sosial. Melalui kekutan kata-kata, sastra mampu menampilkan apa yang tak nyaman dilihat dan menyuarakan yang tak berani dikatakan secara langsung.

Peran ini menjadikan sastra sebagai corong bagi mereka yang acapkali dibungkam. Saat masyarakat tidak memiliki akses bicara karena represi atau ketimpangan struktur sosial, sastra hadir untuk menyuarakan keresahan dan penderitaan mereka. Ia menjadi medium bagi suara-suara terpinggirkan untuk berbicara, bukan hanya kepada penguasa, tetapi juga kepada sesama warga masyarakat sebagai bentuk kesadaran kolektif.

Sastra juga berperan sebagai entitas alternatif ketika elite politik kehilangan daya representatifnya. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberi arah dan gagasan tandingan. Sastra kontekstual yang lahir dari kegelisahan sosial dan berakar pada realitas lokal adalah bentuk perwujudan konkret peran ini. Melalui narasi fiksi, penyair, cerpenis, dan novelis mengajak publik merefleksikan kondisi sosial-politik dan membuka kemungkinan berpikir serta bertindak di luar nalar kekuasaan.

Lebih dari sekadar pantulan realitas, sastra adalah alat intervensi budaya yang bisa memicu perubahan. Ia mengusik kenyamanan *status quo* dan menggelisahkan struktur lama yang menindas. Dalam spirit *advocatus diaboli*, sastra tidak membiarkan kekuasaan berjalan tanpa koreksi, tidak membiarkan masyarakat larut dalam apatisme. Ia menyodorkan pertanyaan-pertanyaan penting: siapa yang diuntungkan di balik kebijakan? Siapa yang dikorbankan di balik mitos pembangunan?

Dengan demikian, sastra sebagai *advocatus diaboli* menjalankan fungsi etik dan politik sekaligus: menantang narasi mapan, membela kaum lemah, dan menjadi pengingat bahwa kekuasaan sekecil apa pun harus selalu diawasi, sebab kekuasan itu perlu dikontrol. Ketika politik lupa akan nurani, sastra hadir untuk merevitalisasikannya. Dan ketika rakyat kehilangan suara karena riuhnya janji-jani para pemimpin, sastra menjadi gema yang tak mudah diredam. Sastra sebagai *advocatus diaboli* berperan untuk “mengganggu” kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat serta menyuarakan ketidakadilan dan marginalisasi sosial.

Sastra yang demikian harus aktif menyuarakan suara mereka yang dibungkam. Ia menjadi ruang kritik, ruangt rakyat dapat “berbicara” ketika kekuasaan membuat mereka merasa ditindas. Dalam kondisi ketimpangan dan ketidakadilan, sastra mengambil peran moral dan politis sebagai penggugat, pembela, sekaligus penyambung lidah publik yang tertindas.

Dalam dunia pendidikan, sastra tidak boleh dipandang sebagai pelengkap saja, tetapi harus menjadi fondasi: agar melahirkan kreativitas, keberanian berpikir, dan solusi *out of the box.* Namun, faktanya banyak ruang kelas masih dipenjara pola pikir lama: menghafal materi, jawaban yang pasti, takut salah. Di sinilah peran guru menjadi revolusioner yakni pengajar sekaligus pemantik lahirnya sastra sejak dini. Dengan pertanyaan terbuka, proyek kreatif dan ruang berekspresi, guru bisa menjadikan kelas sebagai laboratorium ide dan imajinasi, bukan pabrik nilai.

**Penutup**

Sastra memiliki ruang etis dan politis yang mampu menggugat, membela, dan menyuarakan yang terbungkam. Dalam semangat *advocatus diaboli*, sastra memainkan peran penting sebagai penjaga nurani kolektif, mengoreksi kekuasaan, menyuarakan keadilan dan membangkitkan kesadaran sosial. Di tengah dunia yang kerap dibungkam oleh dominasi narasi tunggal, sastra hadir sebagai suara alternatif yang memantik dialog dan revolusi. Tantangannya adalah bukan hanya bagaimana menciptakan karya sastra, tetapi bagaimana menjadikannya relevan, menggigit fakta dan keberanian untuk bersuara. Maka dari itu, kita semua, sastrawan, pembaca, pendidik, dan masyarakat luas memiliki tanggung jawab untuk merawat fungsi kritis sastra ini. Jangan biarkan sastra terkurung dalam bingkai hiburan semata atau tereduksi menjadi komoditas belaka. Karena kata-kata, jika diarahkan dengan nurani dan keberanian, mampu mengubah kebijakan penguasa yang irasional.

